**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

1. **Landasan Hukum Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk**
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Nomor 5106);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253) beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1421);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND / PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya;

Guna menjamin ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, maka telah terbit DIPA BUN Tahun Anggaran 2019 Nomor 999.07.1.984149/2019 tanggal 28 Desember 2018. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, telah diamanatkan Program Pengelolaan Subsidi Pupuk. Sebagai tindaklanjut terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019.

Implementasi Peraturan Menteri tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota tentang alokasi pupuk di masing-masing wilayahnya, sebagai pedoman bagi produsen, distributor dan penyalur pupuk di Lini IV dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Upaya menjamin kelancaran dan efektivitas penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019.

1. **Penyaluran Pupuk Bersubsidi** 
   * 1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usahataninya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

* + 1. Sasaran

Sasaran penerima pupuk bersubsidi adalah petani tanaman pangan, hortikultura, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 ( dua ) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 ( satu ) hektar.

* + 1. Pelaksanaan Program

Penyaluran pupuk bersubsidi dari pabrik (Lini-I), pelabuhan provinsi (Lini-II), gudang produsen di Kabupaten (Lini-III), Distributor (Lini-III), sampai dengan penyalur (Lini-IV ) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik yaitu pupuk urea, SP-36,Superphos, ZA, NPK dan pupuk organic dalam negeri.

Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasrkan Surat Perjanjian Jual Beli ( SPJB ) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya.

Penyalur ( Lini-IV ) atau yang disebut pengecer resmi dapat berbentuk usaha perorangan, kelompok tani, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki surat izin usaha perdagangan ( siup ) dan TDP.

Dalam Peraturan Menteri perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, disebutkan bahwa produsen, distributor, dan pengecer bertanggungjawab atas pengadaan danpenyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan 6 ( enam ) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:

1. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya;
2. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukkannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
3. Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.

Penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di Lini IV kepada petani atau kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 dimana penyaluran pupuk kepada petani/kelompoktani dilakukan dengan pola tertutup menggunakan RDKK ( Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ) dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

Sebagai data dasar dalam penetapan kebutuhan riil pupuk bersubsidi, maka penyusunan RDKK diharapkan akurat, sesuai luas lahan yang diusahakan petani ( petani pemilik/petani penggarap) untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dengan luas yang ditetapkan maksimal 2 ha dan untuk budidaya tambak ikan dan atau udang dengan luas maksimal 1 ha, serta sesuai kebutuhan/kemampuan petani dalam pembelian pupuk bersubsidi.

* + 1. Tujuan Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk

Tujuan subsidi merupakan salah satu yang penting dalam penentuan kebijakan subsidi pupuk, khususnya untuk penentuan pola subsidi dan sistem distribusi. Terdapat empat tujuan utama subsidi pupuk yang berhasil diidentifikasi, yaitu dapat meningkatkan produksi pangan, meningkatkan pendapatan petani, menyerap tenaga kerja dan menjamin ketersediaan pupuk. Prioritas tujuan subsidi yang akan dicapai akan mempengaruhi kebijakan subsidi pupuk yang akan dipilih.

1. **Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat**

Menurut Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, Nasiruddin, definisi dari implementasi kebijakan adalah proses dimana program atau kebijakan dilaksanakan, ia merupakan penerjemahan atas rencana ke dalam praktek. sedangkan kebijakan subsidi pupuk ini merupakan program kebijakan dari kementerian pertanian, maka penerapannya harus sesuai dengan isi kebijakan dari pusat. Penerapan pupuk bersubsidi dari PT. Pusri harus berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang sekarang prosesnya sudah menjadi (e-RDKK) yang diajukan melalui Kelompok Tani (Poktan). Pengajuan RDKK dianggap sebagai tolak ukur penyaluran pupuk bersubsidi, pupuk hanya bisa diterima jika ada RDKK. RDKK Merupakan rencana kebutuhan kelompok tani satu musim tanam, yang disusun berdasar musyawarah anggota kelompok tani dan didampingin oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Kebutuhan itu meliputi benih, pupuk dan pestisida.[[1]](#footnote-2)

Untuk penjualan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan tempat yaitu dijual ditempat yang semestinya yaitu kios pengecer resmi pupuk bersubsidi dengan ketentuan harga harus sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Untuk sistem distribusi penyalur dari dinas kabupaten hanya sekedar tau saja, sedang kan yang mendistribusikan itu namanya dia penyalur, penyalur itu distributor dan kios, dari produsen – distributor – langsung ke kios.[[2]](#footnote-3)

Praktek penjualan pupuk bersubsidi yang terjadi melalui kelompok tani yang berlangsung di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat justru harganya jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Sehingga mayoritas petani lebih memilih membeli pupuk ke pengecer resmi. Pengecer resmi ini justru menjual pupuk tersebut bukan kepada petani yang sudah terdaftar pada kelompok tani. Namun, mereka malah menjual kepada masyarakat umum, yang notabenenya bukan anggota kelompok tani. Padahal pengecer sendiri hanya boleh menjual kepada petani anggota kelompok tani yang terdaftar dalam RDKK.

Terkait dengan pelaksanaan pupuk bersubsidi yang diterima masyarakat petani padi itu harus sesuai dengan RDKK yang di ajukan setiap kelompok tani dengan didampingi PPL yang selanjutnya, berkaitan dengan pendistribusian kepada kios merupakan tanggung jawab pengecer dan distributor, karena merupakan program dari pusat, kami dari dinas pertanian kabupaten hanya sekedar mengetahui sedangkan pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi sistem distribusi pupuk bersubsidi adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Pemerintah Pusat.[[3]](#footnote-4)

Mekanisme pembagian kewenangan masing-masing kementerian dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Permendag mengatur mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV.
2. Permentan mengatur alokasi pupuk bersubsidi per propinsi serta pengaturan sistim Rencana Definitif Kebutuan Kelompok Tani (RDKK).
3. Peraturan Gubernur mengatur alokasi pupuk bersubsidi per Kabupaten.
4. Peraturan Bupati/Walikota mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan.[[4]](#footnote-5)

Adapun penerapan mekanisme dan tanggung jawab penerapan pupuk bersubsidi diatur secara berjenjang, sbb:

1. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional sesuai dengan prinsip 4 (empat) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
2. Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 4 (empat) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
3. Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 4 (empat) Tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya; dan
4. Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani di lokasi kios pengecer.[[5]](#footnote-6)

Dalam pelaksanaannya, kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih menimbulkan banyak permasalahan. Dari aspek penerima manfaat, petani masih kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. Bahkan, petani kerap kali merasakan kelangkaan pupuk. Selain itu, harga pupuk berada diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ditemukannya masalah penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk.

Berdasarkan penelusuran penulis, terjadi praktek penjualan pupuk bersubsidi di luar kelompok tani berlangsung di Kelurahan Hinai Kiri. Bahkan, mereka juga menaikkan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Modusnya dalam menyalahgunakan pupuk bersubsidi, pengecer resmi ini justru menjual pupuk tersebut bukan kepada petani yang sudah terdaftar pada kelompok tani. Namun, mereka malah menjual kepada masyarakat umum, yang notabenenya bukan anggota kelompok tani. Bahkan, dengan harga di atas HET. Dalam satu sak pupuk bersubsidi dengan berat 50 kg dengan HET Rp. 90.000,- di lapangan pengecer menjual dengan harga Rp 125.000,- Bahkan, ada yang menjual lebih dari itu, praktek tersebut sudah berjalan sejak lama.[[6]](#footnote-7)

Kecamatan Secanggang memiliki 17 Desa dengan 157 kelompok tani yang tergabung dalam 9 Gapoktan dan 15 PPL PNS/Non PNS/ PPL THL-TB yang bertugas di setiap wilayah di Kecamatan Secanggang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Wilayah Kerja BPP, Jumlah Desa, Jumlah Kelompok Tani dan Jumlah Penyuluh Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Langkat

Tabel 4. . Wilayah Kerja BPP, Jumlah Desa, Jumlah Kelompok Tani dan Jumlah Penyuluh Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Langkat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama BPP** | **WKBPP** **(Kecamatan)** | **Jumlah Desa/** **Kelurahan** | **Jumlah** **Kelompok Tani** | **Jumlah PPL** |
| 1 | Timbang Lawan | Bahorok | 19 | 66 | 5 |
| 2 | Salapian | Salapian | 17 | 48 | 6 |
| 3 | Kuala | Kuala | 16 | 98 | 9 |
| 4 | Pd. Brahrang | Selesai | 14 | 153 | 9 |
| 5 | Purwo Binangun | Sei Binge | 16 | 179 | 12 |
| 6 | Kw. Begumit Perdamean | Binjai | 7 | 112 | 5 |
| 7 | Perdamean | Stabat | 12 | 95 | 9 |
| 8 | Wampu | Wampu | 14 | 79 | 7 |
| 9 | Secanggang | Secanggang | 17 | 157 | 15 |
| 10 | Tanjung Selamat | Pd. Tualang | 12 | 94 | 6 |
|  |  | Btg Serangan | 7 | 17 | 3 |
|  |  | Sawit Seberang | 8 | 23 | 3 |
| 11 | Cempa | Hinai | 13 | 96 | 9 |
| 12 | Tanjung Pura | Tanjung Pura | 19 | 73 | 12 |
| 13 | Gebang | Gebang | 11 | 97 | 7 |
| 14 | Babalan | Babalan | 8 | 65 | 5 |
| 15 | Sei Lepa n | Sei Lepa | 14 | 65 | 5 |
| 16 | Besitang | Besitang | 9 | 90 | 5 |
| 17 | Pkl Susu | Pkl. Susu | 11 | 89 | 6 |
|  |  | Brandan Barat | 7 | 96 | 5 |
|  | **Jumlah** | | **224** | **1772** | **127** |

*Sumber:* Dinas Pertanian Langkat, 2018

Berdasarkan data tabel tersebut bahwa Kecamatan Secanggang memiliki kategori Kelompok Tani Banyak (KTB) dengan jumlah 157 dengan 15 PPL. Kecamatan Secanggang memiliki 17 kelurahan/desa yaitu yang merupakan tempat penelitian ini kelurahan/desa Tanjung Ibus, Hinai Kiri, Kebun Kelapa dan Sungai Ular dengan jumlah kelompok tani pada masing –masing desa dapat di lihat pada tabel 4.2

Tabel 4. . Nama-Nama Kelompok Tani di Kelurahan/Desa Tanjung Ibus, Hinai Kiri, Kebun Kelapa dan Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama-Nama Kelurahan/Desa Gapoktan dan Kelompok Tani | | | | |
| **No** | **Tanjung Ibus** | **Hinai Kiri** | **Kebun Kelapa** | **Sungai Ular** | |
| Maju Bersama | Sejahtera | Mekar Tani | Makmur | |
| 1 | Bantenan | Harapan Sejahtera | Makmur | Duku Sari | |
| 2 | Buluh Serumpun | Harapan Tani | Ikramah | Maju | |
| 3 | Giat Tani | Kampung Tengah | Sejahtera | Mawar | |
| 4 | Guyub Tani | Kampung Pasir | Sinar Tani | Serasi | |
| 5 | Harapan Tani | Mawar | Teluk Belida | Mekar Sari | |
| 6 | Ingin Jaya | Mekar | Suka Tani |  | |
| 7 | Ingin Maju | Mekar Sari | Sendang Pangan |  | |
| 8 | Karya Tani | Pasar Gunung | Gotong Royong |  | |
| 9 | Maju Bersama | Pertiwi | Sadar |  | |
| 10 | Mekar Tani | Rejomaju | Sidomulyo |  | |
| 11 | Sejahtera | Kwt Sehat | Petak14 |  | |
| 12 | Sri Sari Wangi | Sri Sumberejo |  |  | |
| 13 | Tani Asih | Sumber Setia |  |  | |
| 14 | Tani Terpadu | Sumber Tani |  |  | |
| *Sumber*: Data Gapoktan Kecamatan Secanggang Tahun 2020 | | | | |

Dari data di atas diketahui bahwa Desa Tanjung Ibus, Hinai Kiri memiliki 14 kelompok tani di bawah Gapoktan Maju Bersama dan Sejahtera, Kebun Kelapa memiliki 14 kelompok tani dibawah Mekar Tani dan Sungai Ular memiliki 5 kelompok tani dibawah Gapoktan Makmur. Di Kecamatan Secanggang terdapat kios resmi penyalur pupuk bersubsidi, bernama UD. Sumber Tani berada di Kelurahan Hinai Kiri dan UD. Paiso berada di Desa Tanjung Ibus, memiliki SPJB dengan Distributor CV. Pusri Bumi Sriwijaya (PBS) dan CV. Kontak Agro Sejati (KAS) terhitung sejak tahun 2012. UD. Sumber Tani memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjual pupuk bersubsidi pada tiga desa, Hinai Kiri, Sungai Ular, Kebun Kelapa, dan UD. Paiso bertanggung jawab untuk desa Tanjung Ibus dalam hal ini membawahi 44 kelompok tani.

Setelah mengetahui sumber hukum dan alur pendistribusian yang melandasi pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV Desa Hinai Kiri, Sungai Ular, Kebun Kelapa dan Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang, diperlukan juga data untuk mengetahui siapa saja yang menjadi pelaksana kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Lini IV Desa tersebut. Oleh karena itu, penulis memetakan masalah pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produsen | | Distributor | Kios Pengecer | WKPP Perdesa | Gapoktan | Kelompok Tani |
| PT. Pupuk Indonesia | PT. Petrokimia Gresik  PT. Pupuk Iskandar Muda | CV. Putri Bumi Sriwijaya (PBS) | UD. Sumber Tani  UD. Keliwon | Susi Elfy, SP/  Hinai Kiri | Sejahtera | Harapan Sejahtera  Harapan Tani  Kampung Tengah  Kampung Pasir  Mawar  Mekar  Mekar Sari  Pasar Gunung  Pertiwi  Rejomaju  Kwt Sehat  Sri Sumberejo  Sumber Setia  Sumber Tani |
| Khairunnisa/Kebun Kelapa | Mekar Tani | Makmur  Ikramah  Sejahtera  Sinar Tani  Teluk Belida  Suka Tani  Sendang Pangan  Gotong Royong  Sadar  Sidomulyo  Petak14 |
| Suarinten/ Sungai Ular | Makmur | Duku Sari  Maju  Mawar  Serasi  Mekar Sari |
|  | CV. Kontak Agro Sejati (KAS) | UD. Paiso | Supantoro/Tanjung Ibus | Maju Bersama | Bantenan  Buluh Serumpun  Giat Tani  Guyub Tani  Harapan Tani  Ingin Jaya  Ingin Maju  Karya Tani  Maju Bersama  Mekar Tani  Sejahtera  Sri Sari Wangi  Tani Asih  Tani Terpadu |
| Gambar 5.1 pemetaan Distribusi pupuk bersubsidi dari hasil data observasi olah data | | | | | | |

Dari gambar pemetaan masalah tersebut diketahui, bahwa dalam sistem distribusinya, pupuk bersubsidi melibatkan banyak pihak terkait. Berdasarkan fokus penelitian yang ingin diteliti adalah distribusi pupuk bersubidi di Lini IV. Lini IV merupakan lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh Distributor. Di Lini IV pula penjualan pupuk bersubsidi dari pengecer kepada petani dan/atau kelompok tani dilakukan.

Pemilihan fokus penelitian ini dengan pertimbangan penyimpangan HET rawan terjadi pada Lini IV. Selain itu, pengecer menentukan pupuk bersubsidi yang telah didistribusikan oleh distributor bisa sampai ke petani atau tidak.

Aktor-aktor yang terkait dalam Penerapan pupuk bersubsidi di Lini IV bagi petani di Desa Hinai Kiri, Sungai Ular, Kebun Kelapa dan Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang sebagai berikut:

1. Penyusunan e-RDKK
2. Penyuluh Pertanian Lapangan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Kecamatan Secanggang, yakni Budi Silaban, SP selaku Ketua BPP Kecamatan Secanggang untuk setiap kelurahan/desa didampingi oleh PPL. Tiga kelurahan/desa untuk masing –masing PPL yaitu kelurahan Hinai Kiri, adalah Susi Elfy, desa Sungai Ular adalah Suarinten, desa Tanjung Ibus adalah Supantoro dan desa Kebun Kelapa adalah Khairunnisa.
3. Kelompok Tani di Desa Hinai Kiri, Sungai Ular, Kebun Kelapa dan Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang yang diwakili oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani di masing-masing desa. Terdapat pada tebel Inventaris Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Tanaman Pangan Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Tahun 2020.
4. Kecamatan memberikan tanggung jawab penuh pendampingan pembuatan RDKK kepada setiap Kepala Desa
5. Pendistribusian
   1. Kios-kios resmi di Kecamatan Secanggang yang terdaftar di distributor dalam penelitian ini adalah UD. Sumber Tani dan UD. Paiso
   2. Kelompok Tani Kecamatan Secanggang,: 157 yaitu Desa Tanjung Ibus, Hinai Kiri memiliki 14 kelompok tani, Kebun Kelapa memiliki 14 kelompok tani dan Sungai Ular memiliki 5 kelompok tani.
6. Pengawasan

Unsur-unsur dari Tim Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi:

* 1. Tim Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
  2. Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan, UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Wilayah Binaan Kecamatan Secanggang.

1. **Tahap Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Lini IV Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat**:
2. **Sosialisasi**

Sosialisasi penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dilakukan dalam berbagai kesempatan baik formal maupun informal. Sosialisasi ini pernah dilakukan di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Secanggang. Kegiatan ini dihadiri oleh banyak pihak di antaranya Dinas Pertanian, Staf UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Secanggang selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan Secanggang, Ketua Kelompok Tani. Sosialisasi juga dilakukan di desa pada setiap akan penyusunan RDKK, seperti yang dikatakan Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Secanggang, bahwa:

“Sosialisasi dilakukan pada saat penyusunan RDKK, di Kantor UPTD BPP kecamatan secanggang ini, biasanya kami ada kumpul piket di hari rabu, sedangkan sosialisasi ke petani di sela-sela kegiatan rutin PPL setiap desa”.[[7]](#footnote-8)

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan pada kelompok yakni pada setiap rapat kelompok tani, seperti yang dikatakan oleh Rahmad Syah selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Selotong, sebagai berikut:

“Untuk sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi kita lakukan selain di Kantor Kecamatan kita lakukan juga pada waktu rapat pada setiap kelompok tani di lingkungan Desa Selotong. Hal itu upaya kita agar pengertian kelompok tani dan kios resmi itu dapat berekesinambungan dan biar tidak salah dalam menjalankan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi”.[[8]](#footnote-9)

Lain lagi dengan Kelurahan Hinai Kiri yang tidak melakukan sosialisasi secara formal namun, sosialisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yakni telepon genggam, bahkan ketika penyusunan RDKK seperti yang dikatakan Susi Elfy, SP selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kelurahan Hinai Kiri, sebagai berikut:

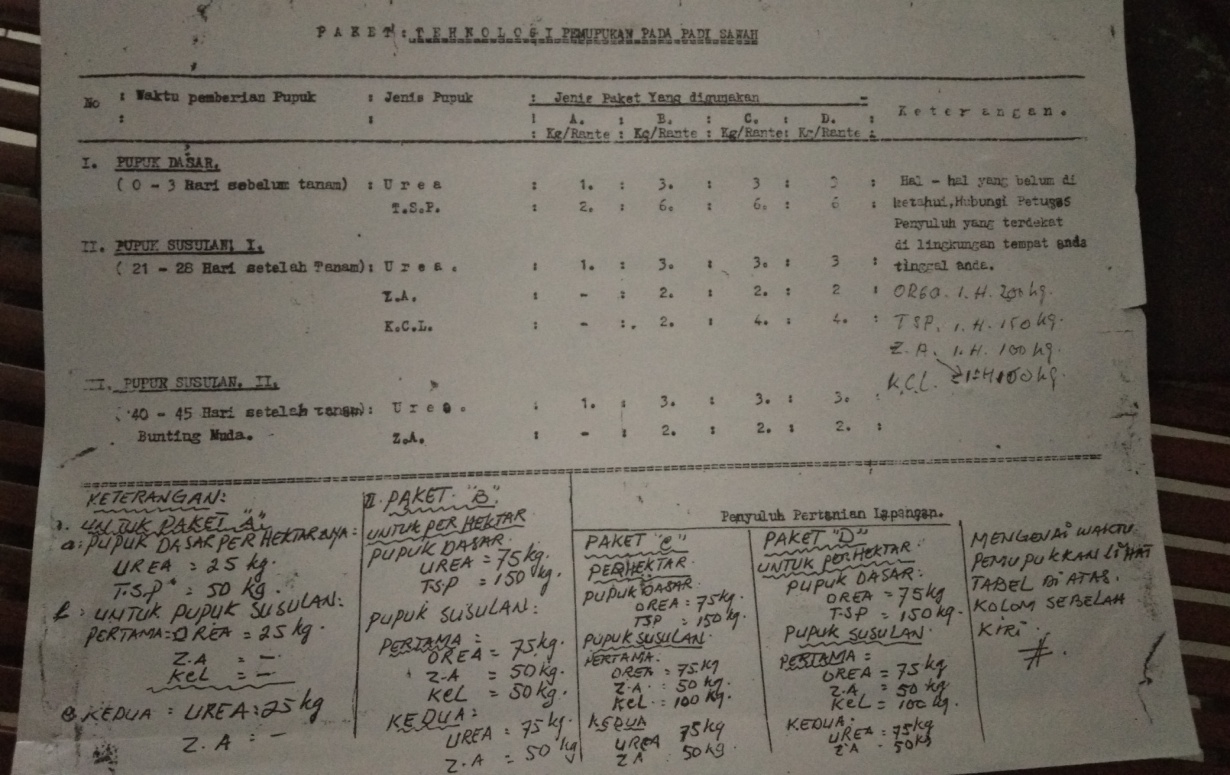
“Pernah *ga* ada sosialisasi atau pemberian buku panduan mengenai pemanfaatan pupuk bersubsidi ini ? *Ga ada,* Selama ini ? *iya”,* kan sosialisasi itu ga harus berkumpul dalam satu ruangan biasa juga kami lakukan berbarengan dengan ketika penyusunan RDKK,” [[9]](#footnote-10)

Menurut pengakuan PPL Kelurahan Hinai Kiri tidak pernah dilakukannya sosialiasi secara formal kepada petani mengenai kebijakan subsidi pupuk ini, tetapi menurut pengakuan Wagiman selaku ketua kelompok tani Sri Sumberjo sudah pernah dilakukan sosialisai/pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait, pernah di lakukan oleh PPL seperti berupa gambar dokumen pada gambar

“Dulu sekali pernah, pas awal-awal. *Wes lali lah.* Ada dokumennya tentang penggunaan pupuk berimbang itu”[[10]](#footnote-11)

Dokumen sosialisasi kelompok tani yang dimaksud berupa anjuran pemakaian pupuk bersubsidi secaran seimbang, pada luasan lahan atau pada paket pemakaian pupuk untuk per*rante* lahan tanam, namun tidak diketahui lagi untuk waktu pelaksanaan sosialisi tersebut, lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 5.2 Paket Teknologi Pemupukan Pada Padi Sawah.



Sumber: Arsip Dokumen Kelompok Tani Sri Sumberjo

Berdasarkan gambar tersebut terdapat panduan waktu pemberian pupuk, jenis pupuk hingga paket lahan tanam yang digunakan. Mengenai waktu pemupukan pada satu kali musim tanam terdapat pupuk dasar pada usia tanam 0 – 3 hari sebelum tanam untuk jenis pupuk urea dengan masing-masing paket pe*rante/*kilogram untuk satu hektar pupuk dasar urea 25 kg dan TSP 50 Kg selanjunya pupuk susulan pertama pada 21- 28 hari setelah tanam dengan pupuk Urea dan ZA 25 Kg begitu juga dengan pemupukan susulan kedua pada 40 – 45 hari setelah tanam / bunting muda. Ketentuan pasti anjuran penggunaan pupuk padi sawah Urea I hektar : 200 Kg, SP-36 1 hektar : 150 Kg, ZA 1 hektar : 100 Kg dan KCL 1 hektar : 150 kg.

1. **Penyusunan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 04/Kpts/RC.210/B/ 02/2019 Tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

“Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).”[[11]](#footnote-12)

Seperti halnya yangi dijelaskan oleh Nasiruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, yang memaparkan dengan gamblang bahwa Penerapan pupuk bersubsidi dari PT. Pusri harus berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang sekarang prosesnya sudah menjadi e-RDKK yang diajukan melalui Kelompok Tani. Pengajuan RDKK dianggap sebagai tolak ukur penyaluran pupuk bersubsidi, pupuk hanya bisa diterima jika ada RDKK. RDKK Merupakan rencana kebutuhan kelompok tani satu musim tanam, yang disusun berdasar musyawarah anggota kelompok tani dan didampingin oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Kebutuhan itu meliputi benih, pupuk dan pestisida.[[12]](#footnote-13)

Pada tahap penyusunan RDKK langkah awal yang dilakukan oleh kelompok tani, dalam hal ini setiap ketua kelompok tani di Kecamatan Secanggang melakukan pendataan petani yang terdaftar di dalam area masing-masing kelompok tani. Pendataan ini dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, pendataan anggota kelompok tani melalui cara mendatangi langsung kepada petani berdasarkan luas lahan kelompok tani yang ditentukan oleh Dinas Pertanian. *Kedua*, petani langsung datang sendiri kepada ketua kelompok tani untuk mendaftar sebagai anggota kelompok tani, apabila lahan usaha tani berada di wilayah binaan kelompok tani.

Langkah selanjutnya adalah penyusunan RDKK yang berisi nama anggota, luas lahan tanam berdasarkan SPPT, dan jumlah kebutuhan pupuk yang dibutuhkan petani. Berikut rekapitulasi RDKK di Lini IV Kelurahan/Desa Hinai Kiri, Sungai Ular, Kebun Kelapa dan Tanjung Ibus pada Januari sampai Juni 2020.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kelurahan/Desa Hinai Kiri, Sungai Ular, Kebun Kelapa dan Tanjung Ibus pada Tahun 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelurahan/Desa | Luas (ha) | Kebutuhan Sarana Produk (kg) | | | | |
| Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
| 1 | Hinai Kiri | 396.8 | 79360 | 59020 | 39180 | 39680 | 0 |
| 2 | Sungai Ular | 386.2 | 77260 | 38620 | 19770 | 8260 | 0 |
| 3 | Tanjung Ibus | 769.3 | 135800 | 67900 | 33950 | 67900 | 0 |
| 4 | Kebun Kelapa | 665,4 | 133040 | 66540 | 33260 | 66540 | 0 |

Sumber: Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Kecamatan Secanggang

Berdasarkan data rekapitulasi RDKK di atas, kita dapat mengetahui kebutuhan *riil* dari petani yang terdaftar di masing-masing kelompok tani. Hasil penyusunan RDKK yang dilakukan oleh masing-masing kelompok tani diajukan kepada aparat desa untuk diverifikasi bahwa luas lahan yang diajukan dalam RDKK sesuai dengan SPPT dan kepada UPTD Pertanian selaku Penyuluh Pertanian bahwa jumlah kebutuhan pupuk yang diajukan dalam RDKK sesuai dengan anjuran penerapan pupuk berimbang.[[13]](#footnote-14)

RDKK yang telah disusun kemudian dibuat rangkap tiga, rangkap pertama disampaikan kepada poktan sebagai pesanan sarana produksi pertanian, lembar kedua sebagai arsip penyuluh dan UPTD dan lembar ketiga untuk arsip pertanian. RDKK inilah yang nantinya sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam penyusuanan alokasi pupuk bersubsidi.

1. **Pendistribusian Pupuk Bersubsidi**

Pendistribusian pupuk bersubsidi di Lini IV dilakukan oleh penegecer resmi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 04/Kpts/RC.210/B/02/2019 Tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya, dijelaskan bahwa.

“Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku”.[[14]](#footnote-15)

Sebagaimana yang di jelaskan Nasiruddin selaku kepada Dinas Pertanian

“Untuk sistem distribusi penyalur dari dinas kabupaten hanya sekedar tau saja, sedang kan yang mendistribusikan itu namanya dia penyalur, penyalur itu distributor dan kios, dari produsen – distributor – langsung ke kios”[[15]](#footnote-16)

Pengecer resmi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan di Lini IV Desa Hinai Kiri, Sungai Ular, dan Kebun Kelapa adalah Kios UD. Sumber Tani sedangkan UD. Paiso adalah Desa Tanjung Ibus. Penyaluran pupuk bersubsidi sebelum petani meakukan pembelian pupuk bersubsidi di kios resmi pengecer pupuk bersubsidi, petani membeli dengan menunggu konfirmasi dari ketua kelompok tani bahwa petani yang bersangkutan merupakan anggota kelompok tani dan ditandai dengan kartu identitas berupa KTP.

Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa untuk menyalurkan pupuk setelah pecah *Delivery Order* (DO) sesuai luas hamparan maka distributor menginformasikan bahwa stok pupuk sudah bisa disalurkan kepada kios resmi untuk kemudian disalurkan kepada kelompok tani, dan penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke kios resmi menunggu konfirmasi dari kios bersangkutan untuk mengambil pupuk bersubsidi di distributor hal ini bertujuan agar meminimalisir penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios kepada petani yang terdaftar di RDKK kelompok tani yang terdaftar di kios tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Hilmy selaku pemilik distributor CV. Kontak Agro Sejati (KAS), sebagai berikut:

“Untuk penyaluran ke kios kita menunggu telpon dari kios *mas*, biar penyaluran dari kios resmi ke kelompok tani atau petani sesuai dengan kelompok tani yang terdaftar, dan kita juga mengkonfirmasi siapa saja yang order dan yang mengambil dari kelompok tani mana yang mau ngambil, karena kita juga mempunyai data RDKK sehingga penyaluran pupuk tidak sampai ketangan yang salah atau ke petani lain desa”[[16]](#footnote-17)

Selaras dengan itu Paiso, pemilik kios pengecer resmi pupuk bersubsdi UD. Paiso memesan pupuk tergantung permintaan dari petani ataupun saat datang musim tanam tiba, dengan melakukan penebusan ke distributor setiap bulan di tanggal 20.

“kalau sudah ada permintaan dari petani atau pas datang musim tanam, tapi kami biasanya harus menebus atau *confirm* dulu untuk stok pupuk di musim tanam tiba, menebus ke distributor itu setelah *confirm* kalau pupuknya di stok untuk kebutuhan pada saat musim tanam, tapi biasanya setiap tanggal 20 itu sudah harus penebusan”.[[17]](#footnote-18)

1. **Pengawasan**

Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh beberapa pihak terkait, di antaranya pihak pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Pengawasan penyaluran pupuk dibuat sebuah tim yang disebut Komisi Pemantauan dan Pengawsan Pupuk Bersubsidi (KPPP). Pada tingkat Kabupaten Tim KP3 diatur dalam SK Bupati Langkat Nomor 521/111/Tahun 2015 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Prestisida Kabupaten Brebes. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 2 poin (f) menyebutkan bahwa:

“Tugas dan tanggung jawab distributor adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya terhadap produsen yang menunjuknya”.[[18]](#footnote-19)

Dari penjelasan di atas, bahwa distributor juga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi.

1. **Laporan**

Laporan penyaluran pupuk bersubsidi di Kelurahan/Desa Hinai Kiri, Sungai Ular, Kebun Kelapa dan Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang oleh distributor pada pada setiap bulan dengan didasari dengan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi kios resmi pengecer pupuk bersubsidi. Selain itu, laporan kegiatan dilakukan oleh KP3 Kecamatan Secanggang kepada KP3 tingkat Kabupaten. Berikut adalah hasil pemantauan KP3 Kecamatan Secanggang.

Sedangkan pelaporan rutin yang dilakukan PPL kepada koordinaor BPP pada setiap rabu adalah pelaporan terkait RDKK disetiap Kelurahan/Desa masing-masing sesuai wilayah tanggung jawab PPL, pelaporan seminggu sekali itu disebut juga dengan piket petugas pentuluh pertanian, untuk selanjutnya Koordinator BPP menyusun dan melaporannya pada hari kamis ke dinas kabupaten Langkat. Seperti yang diungkapkan Rahmad Syah selaku Petugas Anggota Tim Verifikasi dan Validitas Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi Untuk Kecamatan Secanggang .

“Kami berkumpul setiap hari rabu di kantor BPP untuk melakukan pelaporan RDKK setiap desa yang selanjutnya diserahkan kepada koordinator BPP untuk selanjutnya dilaporkan oleh BPP kepada Dinas pada hari kamis dan biasanya kami ada penyegaran *Recarge* untuk para PPL setiap hari senin di BPP Secanggang.”[[19]](#footnote-20)

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa, pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kelurahan/Desa Hinai Kiri, Sungai Ular, Kebun Kelapa dan Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang melalui beberapa tahap, yaitu: sosialisasi, penyusunan RDKK, Pendistribusian, Pengawasan, dan Laporan.

Namun dilain pihak penyalur menurut pengakuan Paiso, pemilik kios UD. Paiso Desa Tanjung Ibus, mengaku pihaknya tidak pernah melakukan laporan secara tertulis disampaikan laporan tersebut kepada distributor maupun Tim Verifikasi dan Validitas Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi Untuk Kecamatan Secanggang hanya melalui konfirmasi *via telfon.*

“Tidak pernah, kadangkan bisa melalui telefon saja, atau ada petugas yang menanyakan berapa pupuk masuk dan yang ditebus*, itu aja*”[[20]](#footnote-21)

Faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan penerapan subsidi pupuk di Kecamatan Secanggang. Dalam penerapan kebijakan pupuk bersubsidi di Lini IV Kecamatan Secanggang sangat rawan akan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi hal ini yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV Desa Hinai Kiri, Sungai Ular, Kebun Kelapa dan Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi sangat rawan digunakan oleh berapa kelompok tertentu hal ini dikarenakan penyaluran pupuk bersubsidi sifatnya tidak langsung ke petani akan tetapi melalui RDKK masing-masing kelompok tani yang terdaftar di masing-masing kios resmi dan kurangnya pengawasan disetiap pendistribusian.

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan. Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa ada indikasi kepentingan individu dari representasi kelompok tani untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, hal ini dibuktikan dengan adanya petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, yaitu petani yang tidak memiliki lahan atau hanya petani yang menyewa lahan dapat membeli pupuk bersubsidi, seperti yang diungkapkan oleh Suherianto Ketua Kelompok Tani “Sumber Setia”, sebagai berikut:

“Masih ada aja mas penyelewengan pupuk, biasanya ada makelar jual pupuk bersubsidi ke petani dengan harga lebih mahal daripada harga di kelompok tani, kalau yang saya tau harganya di atas Rp 135.000 sampai di atas Rp 180.000 persak. Sedangkan kalau kita ambil ke gudangnya langsung hanya sekitar Rp 80.000-100.000 persak. Hampir tidak ada harga yang sesuai dengan ketetapan pemerintah.” [[21]](#footnote-22)

Hal senada juga dikatakan oleh Aripin, petani di Kelurahan Hinai Kiri menyatakan bahwa:

“Biasanya yang beli pupuk bersubsidi di atas HET itu orang yang menyewa lahan di atas 2 hektar, jalannya pake makelar mas, kadang juga bisa beli di kios dengan memanfaatkan koneksi mas”.[[22]](#footnote-23)

Di lain pihak penulis melakukan wawancara dengan Paiso selaku pemilik kios UD.Paiso, yang menyatakan bahwa:

“Untuk penyaluran pupuk bersubsidi kita melayani penjualan ke petani yang ada di RDKK yang ada di kios kita, kita tidak berani untuk menjual pupuk bersubsidi di luar kelompok tani yang sudah menjadi tanggung jawab kita, karena aturannya jelas, memang saya dengar dan banyak dikeluhkan petani kalau ada makelar dari segelintir kelompok tani untuk menjual pupuk di atas HET yang pembelinya orang yang nyewa lahan di atas 2 hektar dan bahkan di luar Desa Tanjung Ibus, ada dua cara yang dipakai, pertama yang bersangkutan *numpang* nama di kelompok tani, yang kedua memang murni pakai makelar”.[[23]](#footnote-24)

Di lain pihak peneliti melakukan wawancara dengan Rahmad Syah selaku Petugas Anggota Tim Verifikasi dan Validitas Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi Untuk Kecamatan Secanggang, menyatakan bahwa,

“Rawannya penyaluran pupuk bersubsidi itu ada di dua tempat di Kios dan di kelompok tani, kadang kita tidak tahu pupuk yang sudah dibeli itu di jual lagi atau gimana, biasanya pakai numpang nama di kelompok tani dan dulu dia memang punya sawah di area kelompok tani yang bersangkutan dan sekarang sawahnya dijual dan yang bersangkutan menyewa lahan di luar dengan luas lebih dari 2 hektar”.[[24]](#footnote-25)

Untuk melihat bahwa masih adanya segelintir orang yang menyewa lahan dan memiliki sawah lebih dari dua hektar peneliti melakukan wawancara dengan Ruslan Bangun, yang tergabung dalam kelompok tani “Buluh Serumpun” pemilik lahan tani di area lahan Hinai Kiri yang menyatakan bahwa,

“Saya dalam menanam padi di lahan sewa saya di wilayah Hinai Kiri, total luas lahannya dua sawah itu adalah 3 hektar, pakai pupuk bersubsidi mas, karena kalau beli pupuk non subsidi mahal mas, saya beli itu 135.000 per sak nya untuk urea daripada beli non subsidi harganya mahal mas, Cuma saya tidak bisa menyebutkan saya beli dari siapa, yang penting saya ambil di orang itu”[[25]](#footnote-26)

Hal senada juga diungkapkan oleh Prayetno, tergabung dalam kelompok tani “ Harapan Tani” Kelurahan Hinai Kiri yang menyatakan bahwa,

“Selain punya sawah sendiri, saya nyewa di Hinai Kiri di sebelah barat mas, dan saya pakai pupuk bersubsidi harganya memang agak mahal mas, tapi masih lebih mahal harga pupuk non subsidi, untuk urea saya beli dengan harga 135.000 per sak, beda dengan harga yang saya ambil sendiri di kios”.[[26]](#footnote-27)

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, masih adanya individu penyewa lahan yang dapat membeli pupuk bersubsidi di Kelurahan/Desa Hinai Kiri dan Tanjung Ibus dengan memiliki koneksi dalam kelompok tani; *Kedua*, masih adanya kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan dalam menjual pupuk bersubsidi; dan *Ketiga*, adanya pembeli dari kelompok lain yang dapat membeli di kios yang bukan menjadi tanggung jawabnya.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi masih adanya ketidakpercayaan dari petani terhadap beberapa personal pimpinan kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi seperti yang diungkapkan oleh Dayat selaku petani dan tergabung di Kelompok Tani “Pertiwi”, yang mengatakan:

“Jarang ada rapat mas di kelompok, kelompok taninya ada kegiatannya yang nggak ada, apa cuma buat pupuk aja, setahu saya tidak ada rapat untuk pupuk, yang saya tau petani cuma dimintai data untuk RDKK pupuk, jangankan pupuk mas, program-program dari pemerintah yang lain kayak bantuan apa jarang turun ke petani.”[[27]](#footnote-28)

Hal senada dikatakan oleh Dedi Prabudi, Anggota Kelompok Tani “Sri Sumberjo”, menyatakan:

“Mana mas program-program dari pemerintah satu, dua cuma yang turun ke petani langsung, gak tau itu kelompok tani sama gapoktannya, rapat ya jarang rapat nama saya ada di anggota tapi gak pernah ada rapat”.[[28]](#footnote-29)

Di lain pihak peneliti melakukan wawancara dengan Paiso, pemilik kios UD. Paiso, yang menyatakan bahwa:

“Banyak dikeluhkan petani, jangankan pupuk pelaksanaan program lain pun banyak yang tidak tersalurkan dengan baik kepada petani baik dari Gapoktan ataupun beberapa kelompok tani”.[[29]](#footnote-30)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, kurang terciptanya kepercayaan dari petani terhadap kelompok tani, hal ini disebabkan bahwa adanya otoritasisasi dalam pengambilan kebijakan dan tidak melibatkan anggota dalam pengambilan kebijakan. Seharusnya menurut Permentan Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Pembinaan Kelompok Tani Bab II huruf A Nomor 1 menyebutkan:

“Karakteristik Kelompok Tani: Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal di pedesaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Ciri Kelompok Tani: (a) Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota; (b) Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; (c) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi. (2) Unsur Pengikat Kelompok Tani: (a) Adanya kawasan usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara para anggotanya; (b) Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya; (c) Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya; (d) Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan; (e) Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.[[30]](#footnote-31)

Dalam pelaksnaan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Hinai Kiri yang menjadi salah satu faktor penghambat adalah kebiasaan petani yang masih menggunakan pupuk bersubsidi dengan tidak menggunakan anjuran pupuk berimbang yang dianjurkan sehingga berimbas pada RDKK yang diberikan. Peneliti melakukan wawancaran dengan Rahmad Syah selaku Petugas Anggota Tim Verifikasi dan Validitas Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi Untuk Kecamatan Secanggang yaitu;

“Faktor lain mengenai penggunaan pupuk berimbang, menurut pemerintah perhektarnya adalah Urea 2 Kw, Phonska 3 Kw, ZA 1 Kw, SP-36 1 Kw, Organik 3 Kw, untuk penggunaan pupuk berimbang kita sudah berulang kali memberi arahan agar tidak menggunakan pupuk melebihi ketentuan pupuk berimbang, sebenarnya pupuk itu tidak sulit, dan tidak langka kalau disesuaikan dengan anjuran pupuk berimbang dari pemerintah hanya kebiasaan petani dalam memberi pupuk yang menjadikan pupuk sulit, contohnya saja dalam pupuk berimbang yang dijatah pemerintah hanya 2 Kw/Hektar tapi kebiasaan petani ada yang *makai* 5 sampai 7 Kw per Hektar kalau RDKK sudah sesuai mas dengan pupuk berimbang, cuma cara pemakaiannya yang berlebihan akhirnya jadi *ga* cukup”.[[31]](#footnote-32)

Hal senada juga disampaikan oleh Suherianto, Ketua Kelompok Tani “Sumber Setia”, yang menyatakan:

“Kalau RDKKnya sudah sesuai dengan anjuran pupuk berimbang dan SPPT yang menjadi masalah itu ada beberapa petani masih *aja pakai* cara lama, yaitu dengan memberi takaran lebih, padahal sudah kita *kasih tau* kalau *ngasih* pupuk itu *ya* sesuai dengan pupuk berimbang, untuk *ngasih* sosialasisasi sudah beberapa kali dilakukan, tapi *ya gitu* karena beberapa petani yang memberi pupuk beranggapan dari dulu-dulu sudah segitu takarannya, *ya* akhirnya mereka menganggap kalau jatah yang mereka terima itu kurang banyak, padahal tidak seberapa banyak kurangnya, tapi memang sebenarnya tetap kurang jatah pupuk yang dialokasikan pemerintah dengan RDKK.”.[[32]](#footnote-33)

Penulis juga melakukan Wawancara dengan Desi Prabudi, Anggota Kelompok Tani “Sri Sumberjo”, yang menyatakan bahwa:

“*Iya* kita tahu mas kalau dari pemerintah itu anjurannya pakai pupuk berimbang, tapi saya tetap pakai acuan ilmu dari bapak saya beda mas kalau dulu-dulunya acuan saya per hektar pakai 4 Kw untuk urea, kalau kata pemerintah *kan* 2 Kw per hektar untuk urea, tapi *ya gimana* mas pakai pupuk berimbang *ya* tetep kurang mas, realisasinya *aja* beda sama RDKK, padahal RDKK itu sudah sesuai dengan pupuk berimbang”.[[33]](#footnote-34)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih adanya petani dalam pemberian pupuk bersubsidi pada saat musim tanam tidak sesuai dengan anjuran pupuk berimbang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga data RDKK yang diberikan masih berdasarkan hitung-hitungan dari budaya cara tanam keluarga. Selain itu, peneliti mengindentifikasi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Secanggang masih ditemukan bahwa sistem penyaluran pupuk bersubsidi dalam beberapa waktu pengiriman yang kurang terkoordinasi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan beberapa pengiriman yang tidak berdasarkan permintaan pengiriman dari kios resmi kepada distributor sehingga mengakibatkan langkanya pupuk bersubsidi ketika dibutuhkan pada saat musim tanam tiba, hal tersebut dapat mengakibatkan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios ke kelompok tani. Berdasarkan wawancara dengan Paiso, pemilik kios resmi UD. Paiso, yang menyatakan:

“Kadang masih *aja* pengiriman itu tidak jelas dari distributornya, tiba- tiba dikirim *aja*, kayak sekarang ini pupuk yang ada *kan ga* laku soalnya belum tiba musim tanam raya, kalau sudah *gitu* kita bingung mau dijual ke siapa, kalau *ga* cepat dijual pupuk itu kan bisa berair, terpaksa saya stok dengan biaya perawatan lebih, kalau sudah begitu kita telpon distributor untuk *confirm* kalau pupuknya di stok untuk kebutuhan padaa saat musim tanam, padahal biasanya itu kita yang *nelpon* untuk dikirim pupuk. Kalau sudah tidak musim tanam kayak sekarang, memang kadang distributor itu *ngirim* barang tiba-tiba, kalau sudah *gitu* saya tolak, atau biasanya saya stok dulu, untuk disalurkan pada saat musim tanam tiba, untuk nambah stok pupuk yang kurang”.[[34]](#footnote-35)

Paiso, juga menyatakan bahwa:

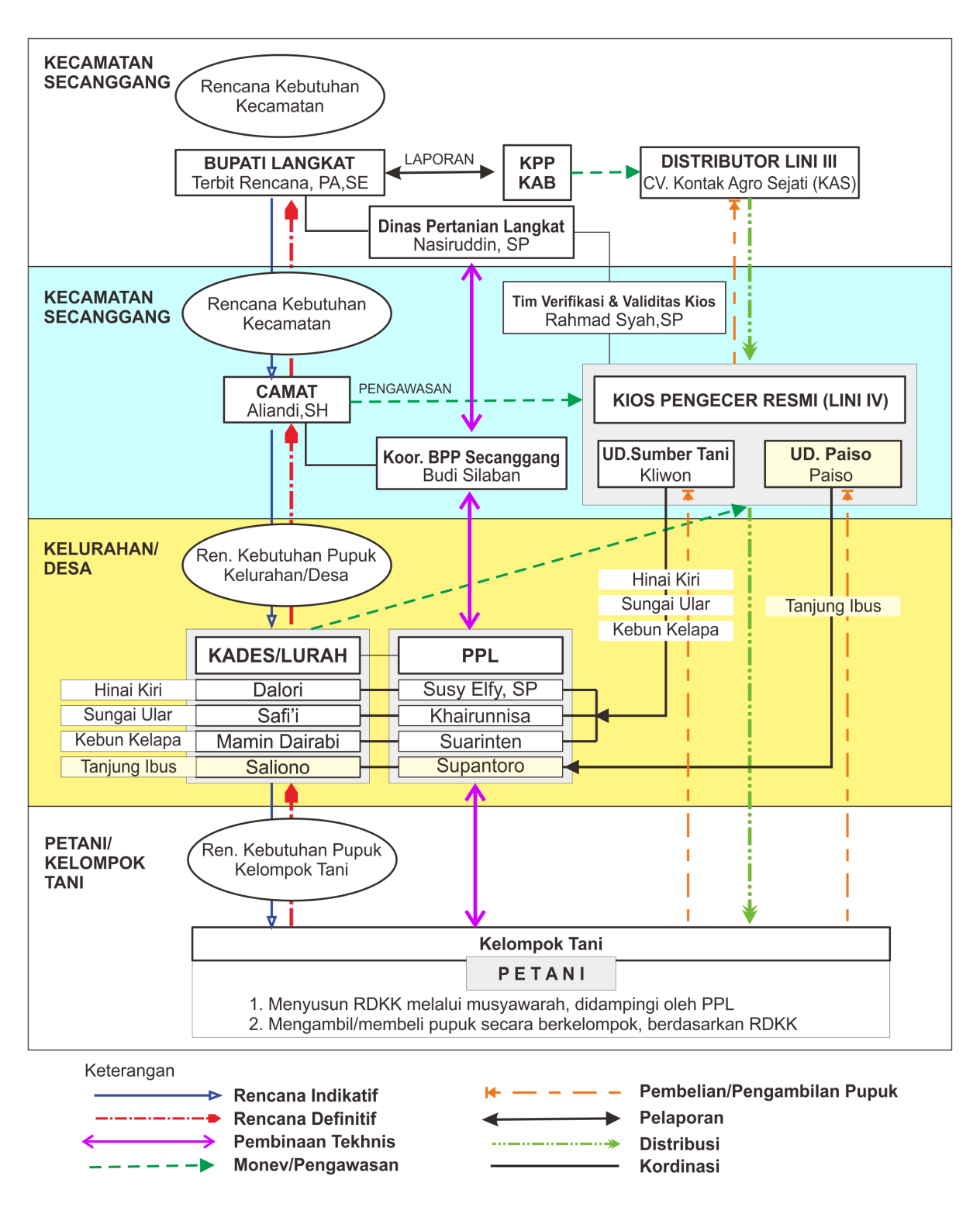
“Kalau sudah tidak musim tanam kayak sekarang, memang kadang distributor itu *ngirim* barang tiba-tiba, kalau sudah *gitu* saya tolak, atau biasanya saya stok dulu, untuk disalurkan pada saat musim tanam tiba, untuk nambah stok pupuk yang kurang”.[[35]](#footnote-36)

Di lain pihak peneliti melakukan wawancara dengan Hilmy, Pimpinan Distributor CV.Kontak Agro Sejati (KAS), menyatakan bahwa:

”Kadang memang pengiriman dari produsen ke kita datang tiba-tiba, kalau sudah begitu biasanya kita menelpon kios mau diambil atau disimpan dulu di gudang untuk disalurkan pada DO berikutnya”.[[36]](#footnote-37)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa yang menjadi penghambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi kurangnya tingkat kepatuhan pihak pelaksana terhadap peraturan, hal ini ditunjukkan bahwa distributor fokus hanya pada penjualan sehingga dari penjualan tersebut distributor dapat mengambil keuntungan sedangkan berdasarkan Peremendag Nomor 15 Tahun 2015 distributor seharusnya wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di kios yang ada di bawahnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan RDKK, dalam hal ini distributor dapat melihat di RDKK bahwa sudah terdapat musim tanam pertama hingga kedua, tidak hanya mendistribusikan pupuk karena ingin mencari keuntungan. Berdasarkan pemaparan diatas dapat di ringkas dalam Gambar. Sistem Penerapan Kebijakan Pupuk Bersubsidi Secara Tertutup pada gambar berikut.

Gambar.5.4 Sistem Penerapan Kebijakan Pupuk Bersubsidi Secara Tertutup



1. **Efektifitas Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Lini IV Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat**

Hasil wawancara dengan kelompok tani, menyatakan bahwa distribusi pupuk bersubsidi belum efektif karena masih sering dirasakan oleh petani terjadinya kelangkaan pupuk, dimana pada tingkat produsen sudah menyalurkan pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan bersama-sama oleh Kelompok Tani. Dengan demikian masyarakat menganggap bahwa model pendistribusian saat ini belum berpihak kepada mereka dan banyak terjadi kendala terutama keterlambatan pengiriman dan kelangkaan yang akan berpengaruh terhadap produktifitas pertanian tanaman pangan berupa padi, bahkan berdampak pada kegagalan panen.

Keterlambatan dan kelangkaan pupuk ini kerap terjadi yang berpengaruh bukan hanya produktifitas tetapi kegagalan panen, sebagaimana diungkapkan Wagiman, ketua kelompok tani “Sri Sumberjo” Kelurahan Hinai Kiri

“*lah* musim tanam tahun lalu 2019 gagal panen, kelangkaan pupuk subsidi ini kerap terjadi*,* karna pupuk subsidi sudah didapat di setiap awal musim tanam terpaksa petani harus membeli pupuk non subsidi di pengecer”.[[37]](#footnote-38)

Disamping itu, keinginan para petani bahwa yang perlu disubsidi bukan hanya pupuk akan tetapi harga hasil panen perlu disubsidi sehingga bisa meningkatkan kesejahteran petani, karena harga pupuk bersubsidi sering sekali tidak sama atau tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Sebagaimana yang diharapkan Susy Elfy SP, Selaku PPL Kelurahan Hinai Kiri mengenai subsidi input pertanian dari pemerintah yang diberikan dialihkan kepada sepenuhnya kepada subsidi output pertanian, dengan kata lain menaikkan harga gabah kering untuk produktifitas pertanian.

“Satu lagikan lebih bagus saya rasa *kalo* panen itu harganya maunya tinggi, ini kadang-kadang payah bertani pas harga panen nanti murah kan kasihan petaninya, bagus kalo panen itu harganya mahal, baru senang saya, kalo menurut saya pribadi ya”.[[38]](#footnote-39)

Berdasarkan hasil penelitian penyaluran subsidi pupuk diatur oleh pemerintah yaitu dengan sistem tertutup, dimana petani dapat langsung membeli pupuk ke pengecer resmi melalui kelompok tani. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan subsidi pupuk. Efektivitas tersebut dapat diketahui melalui enam prinsip tepat yaitu harga, jumlah, waktu, tempat, jenis, dan mutu. Pada penelitian ini untuk mengukur Implementasi kebijakan subsidi pupuk tersebut menggunakan empat dari enam indikator dengan studi kasus di Kelurahan/Desa Hinai Kiri, Sungai Ular Kebun Kepala, dan Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

1. **Tepat Harga,**

Ketepatan harga dapat dilihat dari kesenjangan antara harga pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rata-rata harga yang diterima oleh petani pada setiap jenis pupuk di Kecamatan Secanggang dapat di lihat pada tabel berikut ini.Harga di tetapkan pemerintah[[39]](#footnote-40) dan harga aktual pupuk bersubsidi.

Tabel. 5.5 Selisih Harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga aktual diKecamatan Secanggang

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS PUPUK** | **HARGA SUBSIDI** | | **NON SUBSIDI** | | **SELISIH HARGA** | |
| (Rp/Kg) | (Rp/ZAK) | (Rp/Kg) | (Rp/ZAK) | (Rp/Kg) | (Rp/ZAK) |
| Urea | 1.800 | 90.000 (@50 Kg) | 2.300 | 115.000 | 500 | 25.000 |
| SP-36 | 2.000 | 100.000 (@50 Kg) | 2.500 | 125.000 | 500 | 25.000 |
| ZA | 1.400 | 70.000 (@50 Kg) | 3.700 | 185.000 | 2.300 | 115.000 |
| NPK | 2.300 | 115.000 (@50 Kg) | 2.700 | 135.000 | 400 | 20.000 |
| Organik | 500 | 20.000 (@40 Kg) | 1.250 | 50.000 | 375 | 30.000 |

*Catatan :*

*- HET tersebut berlaku untuk pembelian pupuk dalam tiap kemasan secara tunai di kios* pengecer resmi di lini IV.

Berdasarkan data pada Tabel 5. Diketahui bahwa terdapat selisih antara harga aktual yang diterima petani dengan harga yang seharusnya. Pada pupuk urea, harga sesuai HET adalah 1.800 /Kg atau Rp 90.000 perzak. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa rata-rata harga pupuk urea yang diterima petani adalah Rp 2.300/Kg atau Rp 115.000 perzak. Artinya terdapat selisih harga yang lebih mahal sebesar Rp 500/Kg atau Rp 25.000. Hal ini dapat terjadi karena pedagang dikios pengecer dan kelompok tani mengambil laba yang lebih besar. Akibatnya harga jual pupuk melebihi HET . Begitu pula yang terjadi pada pupuk ZA. Harga pupuk ZA sesuai HET adalah Rp 1.400/Kg atau Rp 70.000 perzak . namun pada kenyatanya petani harus membayar sebesar Rp 3.700/Kg atau Rp 185.000 perzak untuk mendapatkan pupuk ZA . Disana terdapat selisih sebesar Rp 2.300/Kg atau Rp 115.000 perzak. Lebih mahal dari harga pupuk yang ditentukan oleh pemerintah. Maka dapat dikatakan bahwa harga jual pupuk yang ada tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Karena masyarakat membutuhkan pupuk bersubsidi ini, maka kenaikan harga menjadi suatu yang dianggap kewajaran jika harga pupuk bersubsidi dinaikan. Sebagaimana yang dijelaskan Susi Elfy, selaku PPL Kelurahan Hinai Kiri dari pihaknya mengaku paham terhadap kenaikan HET yang tidak sesuai karena yang dirasakan oleh ketua kelompok dampingan sudah terbebani dengan penebusan dan terkena kenaikan harga untuk biaya transportasi dan biaya bongkar muat.

“kami PPL sendiri paham kenapa HET itu bisa tidak sesuai, ya karena kan mereka sendirikan sudah repot, capek dan ***menurut saya*** , adanya kenaikan harga HET itu *gini*, kebijakan ketua kelompok ke anggota kadang kita tidak menutup kemungkinan satu untuk biaya transportasi untuk cetak proposal, kan mereka buat itu terkdang buat kami aja bisa sampai rangkap enam, itu banyak loh, satu lagi kadang ketua atau pengurus butuh transport kan, jadi terkadangkan wajar, kalau saya sih sebagai PPL itu bapak musyawarahkan kepada anggota kelompok, kalau mereka okey, *ya okey*, tapi saya rasa sampai sekarang masih dalam kewajarannyah, kalau anggota masih bisa nerima ya enggak masalah, terkadang ada juga kelebihan harga itu untuk uang kas, terkadangkan ada *gitu”.[[40]](#footnote-41)*

Harga pupuk bersubsidi bisa naik sampai dengan Rp. 2.300/ kg dan bahkan terdapat selisih berat timbangan yang menambah kerugian, sedangkan harga padi terkadang mendapatkan penawaran dengan harga rendah. Artinya, ditinjau dari segi harga maka penyaluran pupuk bersubsidi ini tidak efektif. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa kios pengecer resmi pun tidak melaksanakan ketetapan pemerintah tentang HET. Sebagian besar pengecer dan kelompok tani menjual pupuk diatas HET dengan alasan biaya transportasi. Ada pula yang beralasan sebagai biaya administrasi jika petani tidak membeli secara tunai.

Ironisnya petani di Kecamatan secanggang sebenarnya mengetahui tentang adanya aturan harga eceran tertinggi (HET). Meskipun mereka mengetahui bahwa pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk membuat para petani menganggap barapapun harga yang ditawarkan oleh kios dan kelompok tani merupakan hal yang wajar. Bagi para petani, harga pupuk bersubsidi saat ini sudah sesuai dengan harapan mereka.

1. **Tepat Jumlah**

Penggunaan pupuk bersubsidi sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi yaitu jumlah dosis pupuk yang diperlukan berdasarkan analisa status hara tanah dan kebutuhan tanaman di lokasi. Namun petani enggan menggunakan pupuk organik. Sebagaimana dijelaskan Nasiruddin,SP selaku kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

“Untuk jumlah dosis sesuai dengan kebiasaan masyarakat dilapangan masalahnya masayarakat ini ga mau menggunakan pupuk organik”.[[41]](#footnote-42)

Jumlah pupuk yang tepat berdasarkan status hara dan kebutuhan tanaman yang dianjurkan adalah kombinasi antara Urea rincian lebih lanjut dapat di lihat pada arsip dokumen sosialisasi kelompok tani tentang penggunaan pupuk berimbang ada pada Gambar.4.1 Paket Teknologi Pemupukan Pada Padi Sawah dan Anjuran dosisi pemupukan tersebut lantas disesuaikan dengan luasan lahan yang dimiliki. Anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tiap kelompok tani. Berdasarkan RDKK Kecamatan Secanggang anjuran penggunaan pupuk berimbang yang dianjurkan adalah urea 200 kg/ha, Sp-36 150 kg/ha, ZA 100 Kg/ha dan Phoska 150 kg/ha. Pemupukan diberikan dalam tiga tahap yaitu pemupukan dasar, susualan satu dan susulan kedua. Namun kenyataannya petani di Kecamatan Secanggang mengenai dosis penggunaan jumlah pemupukan melebihi dosis yang ditetapkan oleh pemerintah bukan karena tidak mengtahui, padahal petugas penyulu kerap memberikan arahan mengenai penggunaan pupuk berimbang, tapi masyarakat menggunakan pupuk melebihi ketentuan pupuk berimbang, seperti yang dijelaskan Rahmad Syah, selaku Petugas Penyuluh Pertanian,

“Untuk penggunaan pupuk berimbang kita sudah berulang kali memberi arahan agar tidak menggunakan pupuk melebihi ketentuan pupuk berimbang, sebenarnya pupuk itu tidak sulit, dan tidak langka kalau disesuaikan dengan anjuran pupuk berimbang dari pemerintah hanya kebiasaan petani dalam memberi pupuk yang menjadikan pupuk sulit, contohnya saja dalam pupuk berimbang yang dijatah pemerintah hanya 2 Kw/Hektar tapi kebiasaan petani ada yang *makai* 5 sampai 7 Kw per Hektar”.[[42]](#footnote-43)

Terlebih lagi petani di Kelurahan Hinai Kiri, Kebun Kelapa dan Sungai Ular yang menggunakan pupuk bersubsidi bagaikan menabur beras kepada ayam, dimana pemakaian pupuk yang belum pada waktunya sudah ditabur berkali-kali hingga 7 kali lipat asalkan tanaman padi tersebut cepat tumbuh dan hijau, bahkan seblum hijau tanaman padi itu di berikan pupuk terus menerus, dan kecenderungan petani menggunakan pupuk pada *merk* tertentu seperti yang diungkapkan Susy Elfy,SP selaku PPL Kelurahan Hinai Kiri.

“Kalau di Hinai Kiri khususnya ya, terusterang aja, kenapa sering kekurangan pupuk karena orang Hinai Kiri di kecamatan Secanggang ini Hinai Kiri Kebun Kelapa Tanjung Ibus Sungai Ular itu penggunaan pupuknya jago-jago orang itu dan SDM petaninya, petaninya kalau bertanam *ooooh* kek makan beras dalam pemakaian pupuk itu, jago pemakaian pupuknya, pokoknya kayak biar asal *kesohor*, belum hijau tanaman itu *diiii* pupuk lagi sama orang itu urea, sementara kalo daerah daerah laen *gak palah* orang itu perlu banyak pupuk, jadi mungkin dikios nya ada yang berlebih mungkin orang itu bisa mengambil peluang”.[[43]](#footnote-44)

Selaras dengan pernyataan diatas bahwa petani sangat paham dengan penggunaan pupuk yang tidak sesuai atauran ini dapat menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi, yang seharusnya menurut pemerintah perhektarnya adalah Urea 2 Kw, Phonska 3 Kw, ZA 1 Kw, SP-36 1 Kw, Organik 3 Kw, namun dilapangan petani menggunakan pupuk dengan berlebih yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah seperti yang diakui Sunar BB petani Kelurahan Hinai Kiri.

*“Iya* kita tahu mas kalau dari pemerintah itu anjurannya pakai pupuk berimbang, tapi saya tetap pakai acuan ilmu dari bapak saya beda mas kalau dulu-dulunya acuan saya per hektar pakai 4 Kw untuk urea, kalau kata pemerintah *kan* 2 Kw per hektar untuk urea, tapi *ya gimana* mas pakai pupuk berimbang *ya* tetep kurang mas, realisasinya *aja* beda sama RDKK, padahal RDKK itu sudah sesuai dengan pupuk berimbang”.[[44]](#footnote-45)

Dari hasil penelitian menjunjukkan bawa rata-rata penggunaan pupuk bersubsidi yang menggunakan *merk* tertentu terlebih lagi petani enggak menggunakan pupuk organik dengan lebih cendenng menggunakan pupuk anorganik, dimana kelebihan pupuk anorganik yang berlebih dengan tidak diimbangi pupuk organik akan merusak hara tanah sehingga tanah gersang dan pupuk rusak dalam jangka dekat, sedangkan pupuk organik bukan karena tidak ada stok pada kios tetapi petani tidak menginginkan pupuk organik tersebut dengan alasan bahwa pupuk organik tidak reaktif pada tanaman tersebut.

“Untuk pupuk organik sebenarnya ada namun masyaraktnya gak mau, bahkan untuk pupuk organik sendiri stoknya ada banyak bahkan melimpah, mau beli saturumah pun sekarang bisa, namun masyarakatnya tidak mau karena aplikasinya susah, kan pupuk organik itukan tidak reaktif, hari ini dia aplikasi duatahun lagi baru kelihatan manfaatnya, kemudian masyarakat itu ga tau kalo pupuk organik itu tujuannya adalah untuk merubah struktur tanah bukan untuk memasukkan nutrisi pada tanaman itu”.[[45]](#footnote-46)

Tabel 5.6 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kelurahan Hinai Kiri Sub Sektor Tanaman Pangan Komoditas Padi Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA KELOMPOK TANI** | **Rencana Tanam (Ha)** | **Kebutuhan Pupuk Bersubsidi(kg)** | | | | | |
| **UREA** | **SP-36** | **ZA** | **NPK** | **ORGANIK** | |
| 200Kg/ha | 150Kg/ha | 100Kg/ha | 150Kg/ha |
| 1 | HARAPAN TANI | 47,2 | 9440 | 6580 | 4220 | 4720 | 0 | |
| 2 | KAMPUNG PASIR | 38,8 | 7760 | 5820 | 3880 | 3880 | 0 | |
| 3 | KAMPUNG TENGAH | 33 | 6600 | 4950 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 4 | MAWAR | 29 | 5800 | 4350 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 5 | MEKAR SARI | 28,4 | 5680 | 4260 | 2840 | 2840 | 0 | |
| 6 | MEKAR | 28,2 | 5640 | 4230 | 2820 | 2820 | 0 | |
| 7 | PASAR GUNUNG | 37 | 7400 | 5550 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 8 | PERTIWI | 57 | 11400 | 8550 | 5700 | 5700 | 0 | |
| 9 | SRI SUMBEREJO | 31 | 6200 | 4650 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 10 | SUMBER SETIA | 39,2 | 7840 | 5880 | 3920 | 3920 | 0 | |
| 11 | SUMBER TANI | 28 | 5600 | 4200 | 2800 | 2800 | 0 | |
|  | **TOTAL** | **396,8** | **79360** | **59020** | **39180** | **39680** | **0** | |
|  | Sumber : RDKK Kelompok Tani Kelurahan Hinai Kiri Tahun 2020 | | | | | | |  | |

Berdasarkan tabel 5.5 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kelurahan Hinai Kiri Sub Sektor Tanaman Pangan Komoditas Padi Tahun 2020 tidak adanya direncanakan kebutuhan terhadap pengadaan pupuk organik. Kecenderungan untuk menggunakan pupuk kimia (anorganik) yang tinggi untuk mengejar hasil yang tinggi pada lahan sawah tanpa mempertimbangkan kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah telah menyebabkan kandungan bahan organik tanah menurun, baik jumlah maupun kualitasnya. Hal tersebut disebabkan terjadinya : (a) penimbunan hara (umumnya P) dalam tanah, (b) terkurasnya hara mikro dari tanah yang tidak pernah diberikan melalui pupuk kimia, (c) terganggunya keseimbangan hara dalam tanaman, (d) lebih pekanya tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, dan (e) terganggunya perkembangan jasad renik yang menguntungkan dalam tanah. Kondisi demikian, berakibat terhadap menurunnya produktivitas lahan, tidak efisiennya penggunaan input, serta menurunnya kualitas lingkungan.

Peningkatan dan pemeliharaan kesuburan tanah dapat dilakukan dengan pemberian bahan organik yang tersedia di lokasi (insitu), seperti : pupuk hijau, pupuk kandang, dan jerami padi. Pengembangan pupuk organik ini merupakan langkah strategis mengingat sebagian besar petani padi Indonesia adalah petani yang menghadapi kendala biaya produksi (cost minimization). Dengan orientasi *cost minimization*, maka instrument teknologi untuk meningkatkan hasil per hektar yang signifikan adalah input pupuk organik.

1. **Tepat Tempat**

Ketepatan tempat dalam indikator efektivitas kebijakan subsidi pupuk diukur berdasarkan kios tempat responden membeli pupuk yaitu di pengecer resmi atau bukan pengecer resmi. Pengecer resmi adalah perseorangan, kelompok tani dan badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung.

“Untuk penjualan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan tempat yaitu dijual ditempat yang semestinya yaitu kios pengecer resmi pupuk bersubsidi dengan ketentuan harga harus sesuai Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan”.[[46]](#footnote-47)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat keberadaan kios pengecer yang tidak resmi di Kecamatan Secanggang saat ini sudah tidak ada. Hal ini merupakan hasil dari ketegasan aparat keamanan bekerjasama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Langkat. Namun ada masih banyak yang mengambil pupuk kepada kepada kios/ kelompok tani yang tidak terdata dalam RDKK yang dipegang kios/ kelompok tani, menurut Paiso pemilik UD. Paiso pengecer yang berada di desa Tanjung Ibus, terkadang menjual pupuk kepada petani yang tidak terdata dalam RDKK dengan alasan bahwa petani tersebut adalah keluarga atau tetangga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kelangkaan pupuk ditandai dengan petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di kios/kelompok taninya. Bahkan berdasarkan temuan peneliti didapati kios yang bekerja sama dalam bentuk pembelian/pengambilan antar kios, diungkapan oleh Kliwon, pemilik UD. Sumber Tani.

“RDKK itukan Cuma formalitas *wae,* tapi karna kami kios sendiri kesulitan mendapatkan pupuk ya, namanya juga berbisnis, begitu *sampe* kois sana pupuk *iku* enggak *enek*, *sering enggak enek* *malah*, akeh *sengangger kiose jahat kan emboh di jual nangdi*, *Koyo nggene paiso, malah lek kono ga enek sereng jumuk merene”.[[47]](#footnote-48)*

Dikatakan bahwa RDKK yang memuat luas lahan tanam jumlah pupuk dan data kelompok tani itu hanya dijadikan formalitas semata yang artinya tidak ada kesesuaian dengan penerapan dilapangan, baik ketika RDKK dijadikan acuan para pengecer untuk menjual maupun petani yang mengambil pupuk bersubsidi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kliwon, pemilik UD. Sumber Tani. Kelangkaan bahkan kesulitan pupuk bersubsidi ini menjadikan para kios bersaing dengan saling jual untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Kios pengecer yang tanggung jawab untuk tiga desa sekaligus, kios tersebut adalah UD. Sumber Tani yang memegang wilayah tanggung jawab untuk penyaluran pupuk subsidi tiga desa, Hinai Kiri , Sungai Ular, dan Kebun Kelapa. Sedangakan lokasi kios berada di kelurahan Hinai Kiri, dirasa kurang efektif jika kios bertanggung jawab kepada lebih dari tiga desa dengan lokasi kios jauh dari desa kelompok tani. Bahkan menurut pengakuannya, keliwon merasa *kapok* dengan harus bertanggung jawab untuk tiga desa. Seperti yang disampaikan oleh Suherianto, ketua kelompok tani “Sumber Setia” dimana adanya kios yang bertanggung jawab untuk tiga desa menjadikan pupuk di kios tersebut terkadang terhambat hingga kesusahan untuk mendapatkannya.

“*karna sakngertiku*, disini tuh ada UD. Pengecer yang lokasinya di Kelurahan Hinai Kiri itu bertanggung jawab untuk tiga desa lainnya, bahkan untuk anggota saja sekarang tidak terpenuhi, karna mungkin, di Kelurahan Hinai Kiri ini ada UD. pengecer itu melayani tiga desa, Desa/Kelurahan Hinai Kiri, Kebun Kelapa, Sungai Ular. Rasanya emang ga logika, seharusnya satu UD. Pengecer itu cukup bertanggung jawab untuk satu desa. Karna yang jelas untuk kelompoknya kami ini, untuk mendapatkan pupuk di UD itu kesusahan”.[[48]](#footnote-49)

Meskipun setiap tahun dibuat RDKK untuk dijadikan acuan petani dalam membeli pupuk kepada kios yang memegang RDKK tersebut, masih ada petani dengan luas lahan pertanian lebih dari 2 hektar yang mengambil/membeli pupuk melalui makelar. Dari hasil pembahasan ini dapat dikategorikan kurang berhasil dalam penerapan kebijakan pupuk bersubsidi kepada petani.

1. **Tepat Waktu**

Indikator terakhir yang digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan subsidi pupuk adalah ketepatan tempat yang artinya pupuk subsidi selalu tersedia ketika petani membutuhkan untuk pemupukan baik, pemupukan dasar, susulan pertama maupun susulan kedua dan seterusnya. Seluruh kelompok tani dalam pengakuannya selama tergabung dalam kelompok tani dan mengusahan lahan pertanian selalu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi selalu tidak tersedia ketika petani hendak membeli pupuk. Selama ini selalu terjadi keterlambatan setiap petani membutuhkan.

Kelangkaan pupuk ini kerapkali terjadi di kecamatan secanggang dan ketika itu petani harus membeli pupuk nonsubsidi diluar desa bahkan di luar kecamatan. Berdasarkan penuturan koordinator Balai Penyuluhan Petanian (BPP) Kecamatan Secanggang, dalam penerapan kebijakan subsidi pupuk ini banyak sekali terkendalam dalam pengadaan pupuk bersubsidi, salah satu kendala yang diungkapkan adalah keterlambatan dalam pengadaan pupuk bersubsidi baik di kios itu sendiri maupun ketika kios mengambil ke distributor.

“Kendalanya memang kadang ada keterlambatan datang pupuk itu karna, musim tanam untuk tahun ini memang lebih maju juga awal nya hujan nya datang, sehingga pupuk terlambat untuk petani kita”.[[49]](#footnote-50)

Selaras dengan itu Suherianto juga mengatakan dengan pasti terhadap kelangkaan pupuk yang selalu terjadi terhadap kelompok taninya,

“kalau *sak ngertiku,* yang jelas kekurangan, *artine* disaat petani membutuhkan pupuk itu tidak mencukupi*,* ada tapi tidak mencukupi, kalau telat itu pasti”.[[50]](#footnote-51)

Keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi salah satunya dapat disebabkan akibat keterlambatan penyusunan RDKK, sedangkan musim tanam selalu lebih maju dibanding dengan musimtanam tahun-tahun lalu. Jika PPL dan petani terlambat dalam menyusun dan mengirim RDKK ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan seterusnya maka bisa saja penyaluran pupuk bersubsidi dapat terlambat. Bahkan yang lebih parah, jika pengiriman RDKK melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka pada tahun berikutnya petani di wilayah tersebut tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi,. RDKK disusun satu tahun sebelumnya untuk menentukan alokasi pupuk bersubsidi di tahun berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan UD. Sumber Tani keberadaan pupuk sulit didapat bahkan dikatakan jika ada sekalipun itu tidak mencukupi,

*“Masalahe yo susah distributor kono, masalahe susah tersendat, untuk urea, phoska dalam penyalurannya,* untuk pupuk urea sebenarnya sudah ada, cuman untuk pengangkutan di distriutornya itu cuma 1 transportasinya, *jadi mbagine angel*. *Yo kuranglah, mungkin pelitlah seng jelas, nak distributorkan pengangkutanne seng okeh wong wilayahe endi endi”.[[51]](#footnote-52)*

Keterlambatan pengadaan pupuk di kios pengecer menurut pengakuan dari UD. Sumber Tani adalah karena distributor yang mengantar hanya memiliki satu moda transportasi sedangkan wilayah tanggung jawabnya luas dan untuk menyalurkan harus bertahap dengan beberapa UD. yang menjadi tanggung jawabnya harus menunggu, belum lagi jika terjadi masalah pada moda tranportasinya seperti yang diungkapkan kepala dinas pertanian, kendala dalam alokasi subsidi pupuk, hingga dapat dikira sebagai kendala pada keterlambatan pengadaan pupuk, contohnya moda tranportasinya mogok, pecah ban, dan lain –lain yang menyebabkan keterlambatan pengantaran pupuk tersebut, kontraknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau misal kontraknya terlambat, sementara panennya sudah berjalan, alokasi dari pemerintah pusat sedikit, dan terjadi pemotongan alokasi. Kelangkaan Pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Langkat terutaman Kecamatan Secanggang disebabkan adanya pemotongan dari pemerintah pusat.

“Pupuk subsidi untuk Kabupaten Langkat terutaman kecamatan secanggang banyak kekurangan karena alokasi dari pemerintah pusat sedikit, belumlagi terlambat dalam alokasi subsidi pupuk, hingga dapat dikira sebagai kendala pada keterlambatan pengadaan pupuk, contohnya moda tranportasinya mogok, pecah ban, dan lain –lain yang menyebabkan keterlambatan pengantaran pupuk tersebut, kontraknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau misal kontraknya terlambat, sementara panennya sudah berjalan”. [[52]](#footnote-53)

Kelangkaan pupuk bersubsidi bukan hanya di daerah Kecamatan Secanggang saja, Kelangkaan yang disebabkan pengurangan jatah pupuk dari pemerintah ke petani. Kelangkaan pupuk seperti urea, SP, ZA dan NPK saat ini sudah didapatkan para pertani. Kondisi ini membuat beberapa kelompok tani dan distributor wilayah Kecamatan Secanggang mengeluh, karna banyak desakan oleh para petani yang membutuhkan pupuk. Kelangkaan pupuk bahkan Bapak Gubernur pun sudah kirim surat ke kementerian, tapi belum juga ada relokasi. Kelangkaan Pupuk bersubsidi itu terjadi di Kabupaten Langkat karena dari 7000 ton bulan Oktober hingga Desember untuk disubsidi baru terealisasi sekitar 925 ton. Hingga kini Dinas Pertanian Langkat terus mengusulkan penambahan, namun itu tentu tergantung dari pemerintah Pusat menganggarkan.

Menurut Susy Elfy, SP selaku PPL Kelurahan Hinai Kiri terjadinya pengurangan terutama di Hinai Kiri. Jumlah rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan Departemen Pertanian yang merupakan usulan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten secara umum sudah tepat dari luas pertanaman sesungguhnya, namun terdapat pemotongan alokasi subsidi pupuk dari pusat karena pengukuran luas tanah di ukur menggunakan GPS dari pusat sehingga yang terhitung kurang dari luas tanam sesungguhnya jumlah permintaan pupuk selalu kurang dari yang dialokasikan.

“Kadang-kadangkan sering pupuk kurang – pupuk kurang *gitu*, dengan kebijakan yang *serba* online e-RDKK yang sekarang model input database dan pengukuran pake GPS, yang diakui satelit itu *cuman* 77 hektar, sedangkan di Hinai Kiri *ajalah ya*, luas baku sawahnya 220 H, jadi mereka juga menyediakan pupuk untuk 77 Hektar itu *gak* 220 H”.[[53]](#footnote-54)

Menurutnya pengurangan pupuk subsidi dikarenakan kebijakan pemerintah yang baru dengan menggunakan sistem online berupa input data untuk luas lahan tanam pengukurannya menggunakan GPS Satelit, sedangkan lahan tanam petani sebagain lainnya tidak terdeteksi, seperti lahan sawah yang berada di bawah pohon sawit dan ladang sawah yang berada disekitar perkebunan sawit. Sehingga untuk luasan lahan tanam petani yang terdeteksi hanya 77 hektar dan bukan 220 hektar untuk total keseluruhannya.

Sementara dalam satu kesempatan Suly Elfy, PPL Hinai Kiri mengungkapkan ketidakakurat pengukuran lahan tanam petani yang dilakukan menggunakan GPS terutama tanaman pangan yaitu lahan sawah.

“*Satulagi* kadang-kadang GPS atau satelitnya tidak terbaca lahan sawah *pas* musim kering ga ada air, mereka pake GPS mengira sawah itu *pas* ada air, *pas* lalang-lalangnya itu mereka ga mengira itu sawahkan, karena tidak melihat langsung ke lokasinya dirasa tidak akurat”. [[54]](#footnote-55)

Berdasarkan pembahasan mengenai keefektivitasan kebijakan subsidi pupuk dengan menggunakan 4 indikator ketepatan, yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat waktu. Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian membuktikan ketidakefektivan implementasi kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabel : 5.6. Hasil Penelitian Dengan Indikator Empat Tepat | | |
| **No** | **Indikator Tepat** | **Hasil Penelitian** |
| **1** | Harga | -Diketahuan bahwa terdapat selisih antara harga aktual yang diterima petani dengan harga yang seharusnya, disana terdapat selisih sebesar Rp 2.300/Kg atau Rp 115.000 perzak |
| **2** | Jumlah | -Masih adanya kecenderungan petani terhadap merk pupuk tertentu  -Kebiasaan petani ada yang *makai* 5 sampai 7 Kw per Hektar atau 2 sampai 3 kali lebih banyak dari anjuran yang ditetapkan.  -Kecenderungan menggunakan pupuk kimia (anorganik) yang tinggi dan enggan menggunakan pupuk organik |
| **3** | Tempat | -Terdapat kios yang bertanggung jawab kepada lebih dari satu desa otomasis dengan lokasi kios jauh dari desa.  -Petani dengan luas sawah lebih dari 2 hektar yang mengambil/membeli pupuk melalui makelar |
| **4** | Waktu | - Selama ini selalu terjadi keterlambatan setiap petani membutuhkan. |
|  | | |

Pada dasarnya tujuan kebijakan subsidi pupuk yang pada intinya untuk kesejahteraan petani serta kesinambungan usaha taninya, masih terkendala pada peraturan yang kurang ditaati oleh pelaksana di lapangan dan sistem distribusi pupuk yang masih belum teratur dan konsisten.

Hambatan yang ditemui dalam penerimaan distribusi pupuk bersubsidi diantaranya :(a) Tidak tersedianya pupuk di kios pengecer; (b) Ketidaktepatan waktu ketersediaan pupuk bagi petani; (c) Penjualan harga pupuk bersubsidi oleh kios pengecer menjadi tidak sesuai dengan harga patokan eceran tertinggi dari pemerintah; dan (d) Anjuran pemakaian yang melebihi dosis pupuk berimbang.

1. Wawancara dengan Nasiruddin, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat pada tanggal 09 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-2)
2. Nasiruddin. [↑](#footnote-ref-3)
3. Nasiruddin. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Dokumentasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat, dikutip pada tanggal 24 Juni 2020*. [↑](#footnote-ref-5)
5. {Formatting Citation} [↑](#footnote-ref-6)
6. Observasi Penulis pada tanggal 1 April 2019. [↑](#footnote-ref-7)
7. Wawancara dengan Budi Silaban selaku Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada tanggal 18 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wawancara dengan Rahmad Syah selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Selotong pada tanggal 15 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-9)
9. Wawancara dengan Susi Elfy selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kelurahan Hinai Kiri pada tanggal 17 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-10)
10. Wawancara dengan Wagiman selaku ketua kelompok tani Sri Sumberjo pada tanggal 10 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-11)
11. Shuntong Kang, “Peraturan Menteri Pertanian Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020,” 2507.1 (2020), 1–9. [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara dengan Nasiruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langka pada 9 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-13)
13. Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Kelurahan/Desa Hinai Kiri, Sungai Ular, Kebun Kelapa dan Tanjung Ibus pada Tahun 2020. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Keputusan Menteri Pertanian R.I No. 04/Kpts/RC.210/B/2019 tentang Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2019*. [↑](#footnote-ref-15)
15. Wawancara dengan Nasiruddin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langka pada 9 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Wawancara* dengan Hilmy, pemilik distributor CV. Mitra Usaha Tani pada tanggal 16 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-17)
17. Wawancara dengan Paiso, pemilik kios UD. Paiso pada tanggal 21 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-18)
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 2 poin (f) [↑](#footnote-ref-19)
19. *Wawancara* dengan Rahmad Syah selaku Petugas Anggota Tim Verifikasi dan Validitas Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi Untuk Kecamatan Secanggang pada 15 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-20)
20. Wawancara dengan Paiso, Pemilik kios UD. Paiso pada tanggal 21 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Wawancara* dengan Suherianto, Ketua Kelompok Tani “Sumber Setia” pada tanggal 4 April 2020 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Wawancara* dengan Aripin, petani di Kelurahan Hinai Kiri pada tanggal 15 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Wawancara* dengan Paiso, Pemilik Kios UD. Paiso Desa Tanjung Ibus pada 21 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Wawancara* dengan Rahmad Syah selaku Petugas Anggota Tim Verifikasi dan Validitas Kios Resmi Pengecer Pupuk Bersubsidi Untuk Kecamatan Secanggang pada 15 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Wawancara* dengan Ruslan Bangun, pemilik lahan tani di area desa Tanjung Ibus, pada tanggal 13 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-26)
26. Wawancara dengan Prayetno, Anggota Kelompok Tani “Harapan Tani“ pemilik lahan tani di area lahan wilayah barat Hinai Kiri, pada tanggal 14 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Wawancara* denganDayat, petani dan tergabung di Kelompok Tani “Pertiwi”, pada tanggal 14 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Wawancara* dengan Karyata, Anggota Kelompok Tani “Suka Hati”, pada tanggal [↑](#footnote-ref-29)
29. *Wawancara* dengan Paiso, Pemilik Kios UD. Paiso Desa Tanjung Ibus pada 21 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-30)
30. Permentan Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Pembinaan Kelompok Tani Bab II huruf A Nomor 1 [↑](#footnote-ref-31)
31. Wawancara dengan Susi Elfy selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kelurahan Hinai Kiri pada tanggal 17 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-32)
32. Wawancara dengan Suherianto, Ketua Kelompok Tani “ Sumber Setia” pada tanggal 11 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-33)
33. Wawancara dengan Sunar BB, Anggota Kelompok Tani “ Sri Sumberjo” pada tanggal 14 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-34)
34. Wawancara dengan Paiso, pemilik kios resmi UD. Paiso pada tanggal 21 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-35)
35. Paiso. [↑](#footnote-ref-36)
36. Hilmy, Pimpinan Distributor CV. Kontak Agro Sejati (KAS) pada tanggal 16 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-37)
37. Wawancara dengan Wagiman, Ketua Kelompok tani Sri Sumberjo Kelurahan Hinai Kiri pada tanggal 10 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-38)
38. Wawancara dengan Susy Elfy, SP selaku PPL Kelurahan Hinai Kiri pada tanggal 17 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-39)
39. *KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA*. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 [↑](#footnote-ref-40)
40. Wawancara dengan Susy Elfy, SP selaku PPL Kelurahan Hinai Kiri pada tanggal 17 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-41)
41. *Wawancara* dengan Nasiruddin, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat pada tanggal 09 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-42)
42. Wawancara dengan Rahmad Syah, Petugas Penyuluh Pertanian pada tanggal 15 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-43)
43. Wawancara dengan Susy Elfy, Selaku PPL Kelurahan Hinai Kiri pada tanggal 17 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-44)
44. [↑](#footnote-ref-45)
45. Wawancara dengan Nasiruddin pada tanggal 10 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-46)
46. Wawancara dengan Nasiruddin, Kepala Dinas Pertanian Kab. Langkat pada tanggal 10 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-47)
47. Wawancara dengan Keliwon, pemilik kios UD. Sumber Tani pada tanggal 18 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-48)
48. Wawancara dengan Suherianto, Ketua Kelompok Tani “Sumber Setia” pada tanggal 11 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-49)
49. Wawancara dengan Budi Silaban,SP, selaku koordinator BPP Kecamatan Secanggang pada tanggal 18 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-50)
50. Wawancara dengan Suherianto , Ketua Kelompok Tani “Sumber Setia” pada tanggal 11 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-51)
51. Wawancara dengan Kliwon, pemilik Kios UD. Sumber Tani pada tanggal 18 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-52)
52. Wawancara Nasiruddin , Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat apda tanggal 10 Juni 2020 [↑](#footnote-ref-53)
53. Wawancara Susy Elfy, SP sebagai PPL Kelurahan Hinai Kiri Pada tanggal 17 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-54)
54. Susy Elfy [↑](#footnote-ref-55)